



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029

DINAS PERTANIAN KOTA BIMA

Jalan Karantina Kelurahan Jatiwangi Kota Bima – NTB

Email : distannakkobi@gmail.com

Website: pertanian.bimakota.go.id

Telp. 0374-44085 Fax: 0374-44085



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Bima periode 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang tersusun dari hasil serangkaian proses evaluasi dan perencanaan pembangunan pertanian di Kota Bima yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Bima, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja program pembangunan pertanian sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan visi misi Kota Bima sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMD 2025-2029.

Pimpinan dan seluruh karyawan Dinas Pertanian Kota Bima memiliki konsekuensi untuk melaksanakan Renstra ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dalam mewujudkan pencapaian visi Pemerintah Kota Bima yaitu **“Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan”**. Keberhasilan pencapaian visi sebagaimana disebutkan diatas tergantung pada komitmen segenap karyawan Dinas Pertanian Kota Bima untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas Pertanian Kota Bima yang lebih baik

Uraian dari setiap pembahasan dalam dokumen ini tentunya belum menggambarkan perkembangan dari keseluruhan aspek pembangunan pertanian Kota Bima. Namun, dalam penyusunan mendatang diharapkan dapat terus disempurnakan dengan berbagai indikator yang lebih relevan, cakupan informasi perencanaan yang lebih luas dan diharapkan mampu mendorong serta mengakselerasi gerak dan langkah para pelaku pembangunan hingga ke tingkat petani di lapangan.

Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Bima ini. Kami juga sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna menyempurnakan dokumen Renstra di masa mendatang.

Kota Bima, Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Pertanian
Kota Bima



Drs. Alwi, M.AP.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199202 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	II
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	IV
Daftar Gambar	V
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum Penyusunan	2
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN dan ISU STRATEGIS	9
1. Gambaran Pelayanan.....	9
A. Tugas Fungsi dan Struktur.....	9
B. Sumber Daya	16
C. Kinerja Pelayanan.....	21
D. Kelompok Sasaran Pelayanan	24
2. Permasalahan dan Isu Strategis	38
A. Permasalahan.....	38
B. Isu Strategis	43
BAB 3. TUJUAN , SASARAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN	45
1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA	45
2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	46
BAB 4. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN dan KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	48
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	66
BAB 5. PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025	16
Tabel 2. Kartu inventaris barang Dinas Pertanian Kota Bima per Tahun 2024	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima.....	22
Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan (<i>Sebelum Pemberlakuan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan</i>).....	26
Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan (<i>Setelah Pemberlakuan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan</i>)	32
Tabel 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	38
Tabel 7 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima	46
Tabel 8. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kota Bima	46
Tabel 9. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan Dinas Pertanian Tahun 2025 – 2029	57
Tabel 10. Indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Bima yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2025 – 2029	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025.....	15
Gambar 2. Persentase tingkat pendidikan pegawai Dinas Pertanian Kota Bima.....	16
Gambar 3. Persentase kelompok umur pegawai Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025	17
Gambar 4. Perkembangan luas tanam komoditas tanaman pangan.....	23

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan amanat Undang–undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025–2029 yang didalamnya memuat sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan pertanian di Kota Bima sedangkan tata cara penyusunan Renstra ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat pemilihan umum serentak tahun 2024 telah menghasilkan kepemimpinan yang baru baik di pusat maupun di daerah dengan masa jabatan tahun 2025–2029 dengan membawa visi dan misi yang baru serta melihat peran strategis dan potensi sektor pertanian di Kota Bima, maka penyusunan Renstra ini merupakan upaya untuk mensinergikan agenda prioritas Nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang termuat dalam RPJMN 2025 – 2029 yang dituangkan dalam Astacita poin kedua yaitu **“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”** serta RPJMN Provinsi NTB 2025 - 2029 terutama misi ketiga **“Membangun ekosistem industri komoditas unggulan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menuju terwujudnya industri agromaritim yang berkelanjutan”** dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima terpilih H. A. Rahman H. Abidin, S.E. dan H. Feri Sofiyon, S.H. yaitu **“Terwujudnya Kota Bima yang maju, bermartabat dan berkelanjutan”**. Visi tersebut ditopang dengan lima misi, terutama misi keempat yaitu **“Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan”** dan misi kelima **“Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan”**. Dengan demikian pembangunan pertanian merupakan prioritas dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional maupun di daerah terutama di Kota Bima dan merupakan faktor penting dalam mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam publikasinya pada buku Kota Bima dalam angka tahun 2024 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 13,68 persen pada Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) serta penyerap

tenaga kerja dan sumber utama pendapatan rumah tangga di Kota Bima. Pertanian sektor tanaman pangan Kota Bima didominasi oleh produksi padi sawah dan jagung dengan total luas panen untuk masing-masing komoditas tersebut yaitu 3.331 dan 7.409 hektar. Sementara itu, produksi tanaman perkebunan didominasi oleh jambu mente sebesar 147,52 ton diikuti dengan kemiri sebesar 46,15 ton dan asam sebesar 33,14 ton. Selain itu, produksi buah mangga dan pisang menjadi produksi buah-buahan tertinggi di Kota Bima yaitu 14,96 dan 10,61 ton. Pada sektor peternakan, Kota Bima dikenal dengan produksi sapi, kambing, dan kerbau. Selama tahun 2023, produksi daging ternak sapi potong, kambing, dan kerbau masing-masing yaitu 415,65 ton, 119,91 ton, dan 7,02 ton.

Kebijakan pembangunan disektor pertanian difokuskan pada enam program utama, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Keenam program utama tersebut diarahkan untuk: 1). Meningkatkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman bahan pangan dan kelembagaan pangan yang bersumber pada budaya lokal; 2). Mengembangkan sistem agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumber daya manusia; serta 3). Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan penguatan modal dan peningkatan pendapatan.

Implementasi program pembangunan pertanian dalam mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi di Kota Bima juga dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya : 1). Masih belum optimalnya pembudidayaan, distribusi dan pemasaran pertanian (urban farming), peternakan dan perkebunan dalam rangka penguatan ketahanan pangan; 2). Manajemen skala usaha pertanian pada umumnya masih rendah, sehingga potensi sektor pertanian tidak tergali; 3). Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan; 4).Pertumbuhan jumlah populasi ternak cenderung stagnan sehingga masuknya daging dari luar untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah; 5). Berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan pertanian ke depan, diperlukan perencanaan yang rasional, efektif dan komprehensif serta terukur sehingga apa yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Bima 2025 -2029 khususnya sektor pertanian dapat terwujud. Oleh karena itu dokumen ini akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membantu Pemerintah Kota Bima membangun pertanian lima tahun kedepan.

2. Dasar Hukum Penyusunan.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang-Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
28. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
29. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor xxx);
43. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91) Peraturan Walikota Bima Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian.
44. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.
45. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.

46. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025–2029 adalah sebagai salah satu upaya merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis serta perumusan program dan kegiatan pembangunan sektor pertanian (subsektor tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perkebunan dan subsektor peternakan) dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan sumber-sumber pendanaan yang dimanfaatkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi melalui pengukuran pelayanan/ kinerja dan merumuskan arah kebijakan serta strategi Dinas Pertanian Kota Bima;
2. Merumuskan prioritas program dan kegiatan tahun 2025 - 2029 Dinas Pertanian Kota Bima dan menyediakan suatu tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Sebagai sarana untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya;
4. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja sekaligus pengendalian program dan kegiatan.

4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 - 2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.

1. Gambaran Pelayanan.
 - a. Tugas, fungsi dan struktur;

- b. Sumber daya;
 - c. Kinerja pelayanan;
 - d. Kelompok sasaran pelayanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis.
- a. Permasalahan pelayanan;
 - b. Isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 1. Tujuan dan Sasaran Renstra;;
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

- 1. Uraian Program;
- 2. Uraian Kegiatan;
- 3. Uraian Subkegiatan, kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
- 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Bima;
- 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP.

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

1. Gambaran Pelayanan.

A. Tugas, fungsi dan struktur

Tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bima nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian maka kedudukan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima adalah :

Tugas :

Dinas Pertanian Kota Bima memiliki tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

Fungsi :

Dinas Pertanian Kota Bima menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- 2) Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- 3) Pengembangan prasarana pertanian;
- 4) pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- 5) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 6) Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 7) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- 8) pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- 9) pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- 10) pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 11) pemberian rekomendasi izin usaha teknis pertanian;
- 12) pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- 13) pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang – Bidang pada Dinas Pertanian Kota Bima

a. Sekretariat

mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- 2) Pengelolaan urusan keuangan;
- 3) Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- 4) Pengelolaan urusan ASN; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- 2) Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang milik daerah;
- 3) Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
- 4) Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- 5) Melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup dinas; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris, melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.

b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 2) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- 5) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 6) Pemberian bimbingan pasca panen, pengelolaan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 7) Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 8) Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi dan mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan Kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- 2) Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- 3) Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- 4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- 5) Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- 6) Pengawasan obat hewan;
- 7) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- 8) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- 9) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan Masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- 10) Pemberian rekomendasi izin di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat veteriner;

- 11) Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
- 12) Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi dan mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

d. Bidang Perkebunan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- 2) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- 3) Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
- 4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- 5) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- 6) Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- 7) Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- 8) Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang perkebunan;
- 9) Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan membawahi dan mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan fungsional berada dibawah dan

bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

e. Bidang Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- 3) Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 4) Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- 5) Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 6) Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- 7) Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyuluhan membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- 2) Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- 3) Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- 4) Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- 5) Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- 6) Pemberian fasilitasi investasi pertanian;

- 7) Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bima

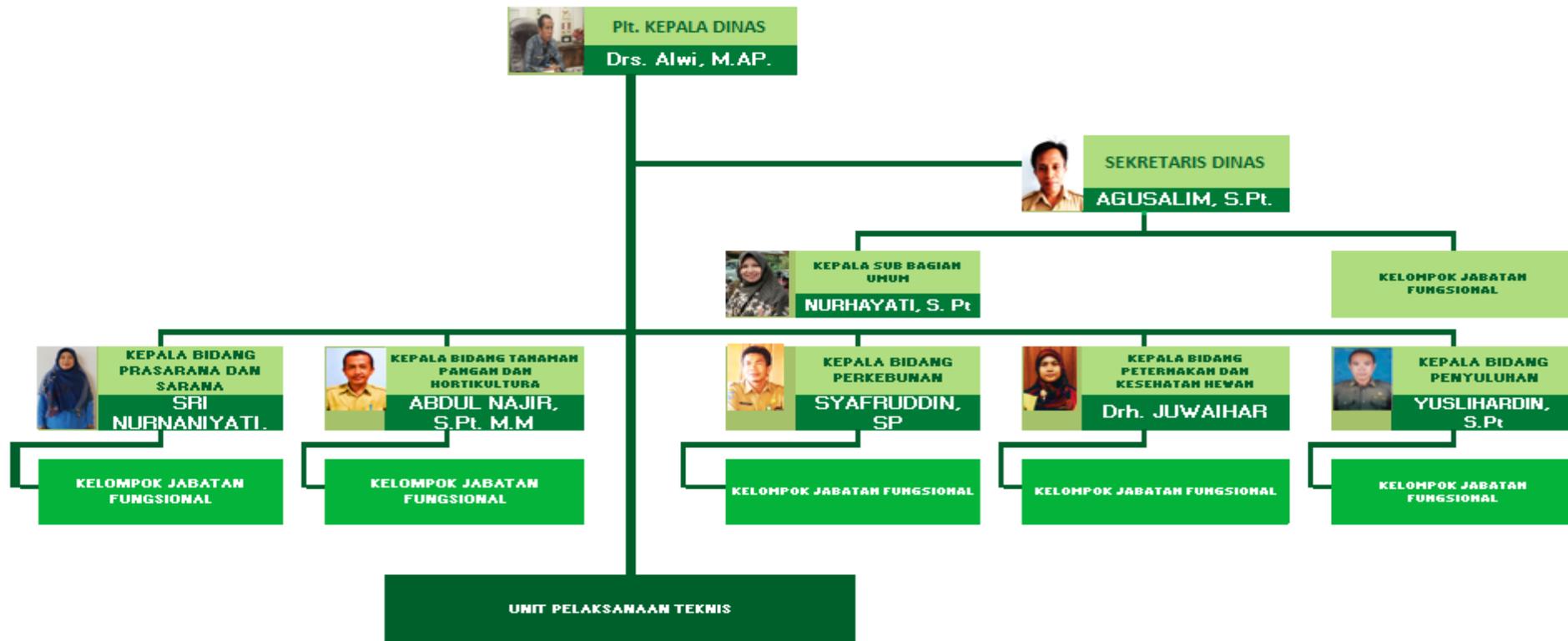
Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bima (berdasarkan Perwali Kota Bima Nomor 77 tahun 2021) terdiri dari:

- a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian.
- b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - 1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.;
 - 2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 3) Bidang Perkebunan dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perkebunan;
 - 4) Bidang Penyuluhan dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penyuluhan;
 - 5) Bidang Prasarana dan Sarana dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Prasarana dan Sarana.
- d) Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bima dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA BIMA



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN

B. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur (pegawai) yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 sebanyak 128 orang terdiri dari : a). Pejabat struktural 18 orang meliputi 1 pejabat eselon II, 6 pejabat eselon III. 11 pejabat eselon IV, b). Jabatan struktural 24 orang, c). 56 Jabatan Fungsional meliputi 32 orang Penyuluh Pertanian, 6 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian, 2 orang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, 3 orang Pengawas Benih Tanaman, 2 Orang Perencana, 2 orang Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, 2 orang Pengawas Mutu Pakan, 1 orang Analis Pasar Hasil Pertanian, 3 Orang Medik Veteriner, 2 orang Pengawas Bibit Ternak dan 1 Orang Analsi Sarana dan Prasarana Pertanian, c).30 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

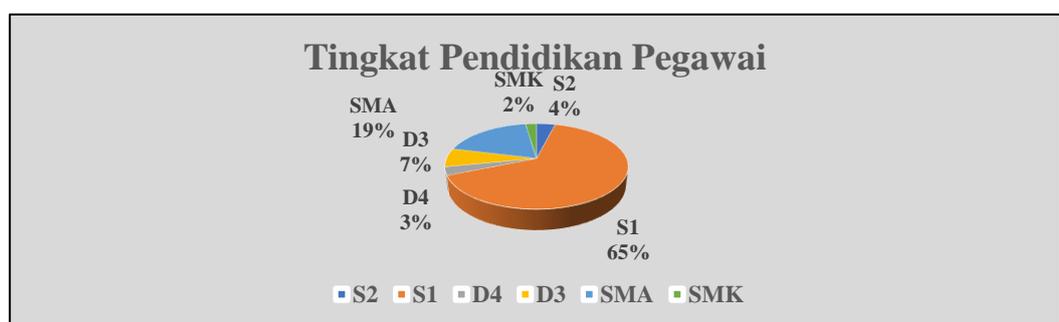
Komposisi Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pertanian Kota Bima pada tahun 2025 terdiri dari : a). Pasca Sarjana (S2) sebanyak 5 orang, b). Sarjana (S1) sebanyak 83 orang, c). Diploma 4 (D4) sebanyak 4 orang, d). Diploma 3 (D3) sebanyak 9 orang, e). Sekolah Menengah Atas (SMA) 24 orang, dan e). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 3 orang.

Berdasarkan data kepegawaian persentase tingkat umur pegawai Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 terdiri dari 27% berumur 50 – 60 tahun, 45% berumur 40 – 49 tahun, 22% berumur 30 -39 tahun dan 5% yang berumur 20 – 29 tahun.

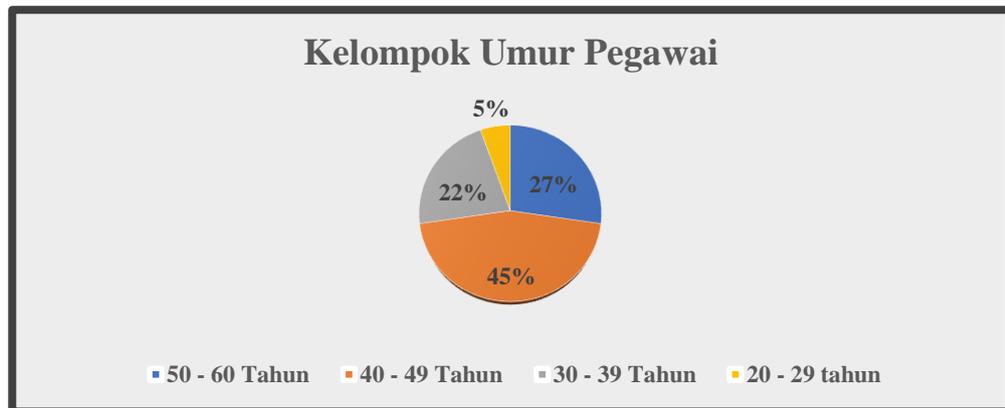
Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025.

No	Uraian	Jumlah Pegawai Berdasarkan								
		Jenis Kelamin			Pendidikan					
		L	P	Jumlah	S2	S1	D4	D3	SMA	SMK
1	PNS (Struktural)	18	24	42	4	33	1	3	1	0
2	PNS (Fungsional)	19	37	56	1	39	3	4	9	0
3	PPPK	16	14	30	0	11	0	2	14	3
Jumlah		53	75	128	5	83	4	9	24	3

Gambar 2. Persentase tingkat penddikan pegawai Dinas Pertanian Kota Bima



Gambar 3. Persentase kelompok umur pegawai Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025.



b. Sumber Daya Alam (SDA) Pertanian

Potensi sumber daya alam pertanian sangatlah penting diperhatikan dan dijaga keberlanjutannya mengingat peran pentingnya terhadap ketersediaan pangan. Sesuai amanat RPJMD Kota Bima 2025 – 2029 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan dan juga mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi hasil pertanian serta peningkatan pendapatan petani. SDA pertanian secara umum dibagi menjadi: a). Sumber daya abiotik (air, tanah/lahan pertanian, udara, cahaya matahari), b). Sumber daya biotik (komoditas yang menunjang siklus produksi pertanian).

Komoditas pertanian di Kota Bima sangat beragam, terdiri dari komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau), tanaman hortikultura (cabai, tomat, alpukat, kelengkeng), tanaman perkebunan (tembakau, mete, kelapa, kopi) dan ternak (sapi, kerbau, kambing, ayam, itik) yang semuanya potensial untuk dikembangkan.

Terkait dengan SDA lahan pertanian, Kota Bima memiliki beragam jenis lahan pertanian, berdasarkan data luas wilayah dan penggunaan lahan di Kota Bima Tahun 2024 lahan pertanian di Kota Bima terdiri dari: a).Lahan sawah yang terbagi menjadi dua yaitu, sawah irigasi dengan luas 1.173,90 Ha dan sawah tadah hujan dengan luas, b).Tegalan/kebun dengan luas 6.146,89 Ha, c).Ladang/huma dengan luas 1299 Ha, d). Perkebunan dengan luas 10 Ha, e). Hutan rakyat dengan luas 2.397 Ha, f). Padang penggembalaan dengan luas 6 Ha, dan g). Hutan Negara 8.265 Ha.

c. Sarana Perlengkapan Kantor

Sarana perlengkapan kantor seperti meubelair dan peralatan elektronik Dinas Pertanian Kota Bima dapat di lihat pada tabel kartu inventaris barang (KIB) tahun 2024.

Tabel 2. Kartu inventaris barang Dinas Pertanian Kota Bima per Tahun 2024.

Uraian	No Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi / Alamat	Jml Brg	Satuan	Nilai	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13815	Timbangan Elektronik			1,00	Unit	21.514.500,00	APBD	31/12/2007
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	17930	P.C Unit			1,00	Unit	9.468.250,00	APBD	23/05/2017
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13920	A.C. Split			1,00	Unit	4.015.000,00	APBD	16/11/2015
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13911	TV Monitor			1,00	Unit	4.162.500,00	APBD	20/12/2016
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13827	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			1,00	Unit	1.210.000,00	APBD	21/03/2016
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13826	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			1,00	Unit	1.210.000,00	APBD	21/03/2016
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13822	Hot Plate Stirer			1,00	Unit	797.000,00	APBD	31/12/2007
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13821	Hot Plate Stirer			1,00	Unit	797.000,00	APBD	31/12/2007
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13820	Hot Plate Stirer			1,00	Unit	797.000,00	APBD	31/12/2007
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	489	Rak Kayu			1,00	Unit	500.000,00	APBD	31/12/2005
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13817	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate			1,00	Unit	10.300.000,00	APBD	31/12/2007
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	19402	Printer (Peralatan Personal Komputer)			1,00	Unit	2.238.500,00	APBD	16/12/2019
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13802	Lemari Es			1,00	Unit	4.500.000,00	APBD	19/11/2014
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13752	Hot Plate Stirer			1,00	Unit	950.000,00	APBD	31/12/2006
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13751	Growth Chamber			1,00	Unit	700.000,00	APBD	31/12/2006
Peralatan dan Mesin	13745	Incubator (Alat Laboratorium Umum)			1,00	Unit	22.000.000,00	APBD	31/12/2006

Uraian	No Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi / Alamat	Jml Brg	Satuan	Nilai	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan
Rusak Berat									
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	7961	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			1,00	Unit	1.183.777,77	APBD	15/11/2017
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	7958	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			1,00	Unit	1.183.777,78	APBD	15/11/2017
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	7950	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV			1,00	Unit	1.183.777,78	APBD	15/11/2017
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	3802	Tabung Gas			1,00	Unit	625.000,00	APBD	31/12/2007
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	1111	Camera Video			1,00	Unit	3.850.000,00	APBD	12/05/2014
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	13818	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate			1,00	Unit	10.300.000,00	APBD	31/12/2007
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	3	Jaringan Pipa Distribusi Lain-lain		Peningkatan PIPANISASI Kel. Nitu	1,00	M2	99.013.483,00	APBD	22/07/2014
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	18391	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas	Irigasi Tanah Dangkal	Usaha Kita Busu Kelurahan Ntobo	1,00	M2	14.698.000,00	APBD	29/11/2013
		Sedang							
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	18185	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap	Pembangunan Embung	Kelurahan Panggi	1,00	M2	9.620.000,00	APBD	14/11/2013
		Irigasi)							
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	9253	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas	Irigasi	Talaga Kelurahan Kodo	1,00	M2	17.595.473,68	APBD	24/05/2016
		Sedang							
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	1873	Sumur Dengan Pompa (Bangunan	Pompanisasi	So Tolo Kodo Kelurahan Kodo	1,00	M2	102.802.158,00	APBD	07/10/2015
		Pengambilan							
		Pengembangan							
		Sumber Air)							
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	1862	Bendung	Embung	So Io Ongge Kelurahan Rontu	1,00	M2	131.859.315,79	APBD	23/09/2016
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	1860	Bendung	Embung	So Duwe Kasipahu Kelurahan Nitu	1,00	M2	132.296.315,79	APBD	09/09/2016

Uraian	No Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi / Alamat	Jml Brg	Satuan	Nilai	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	1854	Bendung		Pembangunan Embung Lokasi 1 Kelurahan SambinaE CV	1,00	M2	121.863.158,00	APBD	13/07/2015
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	1836	Jaringan Pipa Dinas Lain-lain	Pipanisasi	So Dadi Kelurahan Jatibaru	1,00	M2	131.063.000,00	APBD	29/11/2013
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	1834	Jaringan Pipa Dinas Lain-lain	Pipinisasi	Kelurahan Lampe	1,00	M2	146.101.000,00	APBD	29/11/2013
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	17931	P.C Unit			1,00	Unit	9.468.250,00	APBD	23/05/2017
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	1573	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa	Jaringan Irigasi	Pembangunan Irigasi Tersier So Tolo Tando Kel. Mat	1,00	M2	104.111.615,38	APBD	31/12/2012
		Pengembangan Rawa)							
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	17948	Sepeda Motor			1,00	Unit	15.767.200,00	APBD	09/06/2015
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	2	Sumur Dengan Pompa (Bangunan		Pompanisasi Wange Kelurahan Oi Fo'o	1,00	M2	98.139.482,00	APBD	03/10/2014
		Pengambilan							
		Pengembangan							
		Sumber Air)							
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	18784	Bangunan Oceanarium/Observator		Kelurahan Dara	1,00	Paket	50.000.000,00	APBD	17/10/2009
		ium Semi Permanen							
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	11288	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pa		Pasar Raya Kota Bima	1,00	Paket	163.180.000,00	APBD	10/12/2007
		sar Permanen							
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	1313	Pagar Permanen		Pasar Hewan Pasar Raya Bima	1,00	Paket	62.000.000,00	APBD	17/10/2009
Gedung dan Bangunan Rusak Berat	1299	Bangunan Gudang Terbuka Semi		belakang kantor/kebun bibit	1,00	Paket	99.220.000,00	APBD	09/12/2009
		Permanen							
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	114011	P.C Unit			1,00	Unit	9.185.000,00	APBD	02/11/2015
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	113906	Kipas Angin			1,00	Unit	831.250,00	APBD	30/12/2016
Peralatan dan Mesin	88340	Filing Cabinet Besi			1,00	Unit	2.860.000,00	APBD	07/05/2018

Uraian	No Register	Spesifikasi Nama Barang	Spesifikasi Lainnya	Lokasi / Alamat	Jml Brg	Satuan	Nilai	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan
Rusak Berat									
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	18392	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas	irigasi Tanah dangka	Usaha Baru Busu Kelurahan Ntobo	1,00	M2	14.698.000,00	APBD	29/11/2013
		Sedang							
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	1833	Jaringan Pipa Dinas Lain-lain	Pipanisasi	Kelurahan Nitu	1,00	M2	145.764.000,00	APBD	29/11/2013

d. Sumber Daya Prasarana

Dinas Pertanian Kota Bima memiliki beberapa sumber daya sarana yang terdiri dari : kendaraan roda empat sebanyak 2 unit, kendaraan roda tiga sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 81 unit. Sedangkan untuk sumber daya prasarana terdiri dari : 1). Bangunan kantor dinas sejumlah 1 unit, 2). Bangunan kantor unit pelaksana tugas (UPT) sejumlah 6 unit, 2 unit bangunan Poskewan dan 4 unit bangunan balai penyuluh pertanian (BPP), 3). Bangunan Rumah Potong Hewan sejumlah 1 unit, dan 4). 1 unit Pasar Hewan.

C. Kinerja Pelayanan

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Kota Bima, kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat, hal ini menuntut strategi dan kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan produksi pertanian baik itu sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Disisi lain alih fungsi lahan pertanian dan ketersediaan air irigasi pertanian semakin berkurang yang mengakibatkan akselerasi pertumbuhan produksi tidak bisa maksimal. Selama lima tahun terakhir kinerja Dinas Pertanian Kota Bima telah berupaya menjaga peningkatan produksi pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja pada tabel 3. yang menggambarkan capaian Dinas Pertanian Kota Bima terhadap target pada RPJMD 2018 - 2023 dan RPD 2024 - 2026.

Tabel 3. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima

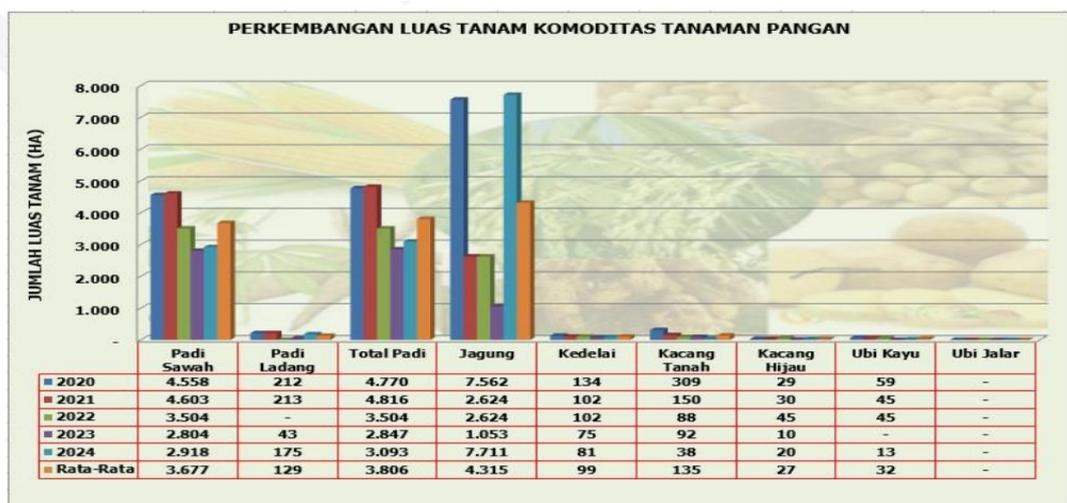
Indikator Tujuan	Target Kinerja						Produksi Peternakan	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			
								Produksi			Produksi			Produksi			Produksi			Produksi			Produksi						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian													
Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan	1,25	1,45	1,65	1,85	2,05	1,85	Daging	1.500,12	1.517,17	101,14	1.527,17	1.547,17	101,31	1.549,26	1.574,22	101,61	1.574,22	1.604,78	101,94	1.611,78	1.643,07	101,94	523,55	983,02	187,76	1.114,73	1.189,00	106,66	
							Kulit	100,87	102,02	101,14	101,03	102,06	101,02	102,06	103,68	101,59	103,68	105,65	101,90	105,65	108,01	102,23	65,65	15,93	24,27	16,19	7,35	45,40	
							Telur	870	879,89	101,14	879,89	891,76	101,35	891,76	906,30	101,63	906,30	923,70	101,92	923,70	943,65	102,16	70,72	461,33	652,33	468,94	908,56	193,75	
J U M L A H								2.470,99	2.499,07	101,14	2.508,08	2.540,99	101,31	2.543,08	2.584,20	101,62	2.584,20	2.634,13	305,76	2.641,13	2.694,73	102,03	659,92	1.460,28	221,28	1.599,86	2.104,91	131,57	
Indikator Tujuan	Target Kinerja						Produksi Pertanian	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			
								Produksi			Produksi			Produksi			Produksi			Produksi			Produksi						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian													
Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	2,87	4,22	5,57	6,92	8,27	2,00	Padi (GKP)	28.728,00	29.477,54	102,61	29.497,54	30.462,11	103,27	30.462,11	31.811,58	104,43	31.911,58	33.874,14	106,15	33.874,14	36.804,26	108,65	30.641,00	20.312,00	66,29	20.718,24	20.326,00	98,11	
							Jagung (FK)	30.835,00	31.639,51	102,61	32.199,51	33.332,94	103,52	33.382,94	34.948,22	104,69	35.198,22	37.574,11	106,75	37.374,11	40.621,91	108,69	32.812,00	52.503,00	160,01	53.553,06	58.593,00	109,41	
							Kedelai (BK)	195	200,09	102,61	200,09	206,51	103,21	206,51	215,02	104,12	215,02	229,06	106,53	229,06	248,35	108,42	206,00	107,00	51,94	109,14	105,00	96,21	
							Kacang Tanah (B)	528	541,78	102,61	541,78	558,84	103,15	558,84	582,98	104,32	583,12	619,91	106,31	619,91	671,43	108,31	384,00	119,00	30,99	121,38	49,00	40,37	
							Kacang Hijau (BK)	15	15,39	102,60	15,39	15,90	103,32	15,90	16,56	104,16	17,32	18,38	106,11	18,38	19,87	108,12	23,00	10,00	43,48	10,20	21,00	205,88	
							Ubi Jalar (UE)	3.419,00	3.508,20	102,61	3.508,20	3.625,38	103,34	3.625,38	3.774,38	104,11	3.774,38	4.001,60	106,02	4.001,60	4.330,53	108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Ubi Kayu (UE)	122	125,18	102,61	125,18	129,50	103,45	129,50	135,01	104,25	135,01	143,52	106,31	143,52	155,16	108,11	0,00	0,00	0,00	334,56	328,00	98,04	
J U M L A H								63.842,00	65.507,70	102,61	66.087,70	68.331,18	103,39	68.381,18	71.483,76	104,54	71.834,65	76.460,72	106,44	76.260,72	82.851,51	108,64	64066,00	73051,00	114,02	74.846,58	79.422,00	106,11	
Indikator Tujuan	Target Kinerja						Produksi Pertanian	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			
								Produksi			Produksi			Produksi			Produksi			Produksi			Produksi						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian													
Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan	2,17	2,27	2,47	2,67	2,87	3,50	Tembakau	0,81	0,83	102,46914	0,83	0,84	102,28	0,84	0,87	102,52	0,87	0,89	102,91	0,89	0,92	103,34	2,10	17,82	848,57	18,44	70,00	379,61	
							Jambu mete	142,79	145,61	101,97493	145,61	149,93	102,28	148,53	152,28	102,52	150,58	154,96	102,91	152,89	157,99	103,34	141,98	147,52	103,90	152,68	148,00	96,93	
							Kelapa	20,05	20,45	101,99501	20,45	20,91	102,28	21,11	21,64	102,52	23,15	23,82	102,91	24,78	25,61	103,34	16,57	17,06	102,96	17,59	17,00	96,65	
J U M L A H								163,65	166,88	101,97	166,88	170,69	102,28	170,48	174,78	102,52	174,6	179,67	308,72	178,56	184,52	103,34	160,65	182,40	113,54	188,71	235,00	124,53	

Sesuai dengan Renstra 2018 - 2023 indikator tujuan Dinas Pertanian Kota Bima adalah persentase peningkatan produksi pertanian. Produksi pertanian dihitung berdasarkan jumlah produksi dari setiap komoditas unggulan persektor pertanian. Sektor tanaman pangan memiliki tujuh komoditas unggulan yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu. Sektor perkebunan memiliki 3 komoditas unggulan yaitu tembakau, kelapa dan jambu mete sedangkan sektor peternakan dihitung berdasarkan produksi daging baik itu daging sapi, kambing, kerbau, dan unggas, kemudian produksi kulit sapi dan kerbau dan juga produksi telur.

Secara keseluruhan capaian produksi komoditi pertanian selalu melebihi target yang ditentukan dengan capaian diatas seratus persen. Untuk komoditi tanaman pangan dengan rata-rata capaian pada tujuh tahun terakhir (2018-2024) dengan angka 106,53, komoditi perkebunan 136,69% dan komoditi peternakan sebesar 152,10%. Hal itu menunjukkan intervensi program dan kegiatan Dinas Pertanian terhadap peningkatan produksi berbagai komoditi pertanian efektif dan memiliki dampak yang signifikan.

Jika dilihat lebih mendalam realisasi produksi tanaman pangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami trend kenaikan sementara pada dua tahun terakhir tahun 2023-2024 cenderung turun, hal ini disebabkan adanya penurunan luas tanam akibat dari alih fungsi lahan yang cukup masif dan dampak perubahan iklim dimana sumber air semakin berkurang. Pada tanaman padi hasil produksi tertinggi dicapai pada tahun 2022 yaitu 36.804,26 ton gabah kering panen(GKP) dan produksi terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 20.312 ton GKP. Penurunan hasil ini sebanding dengan penurunan jumlah luas tanam padi (Gambar 4.) akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan juga berkurangnya jumlah penanaman padi dalam setahun oleh petani yang menyesuaikan jumlah ketersediaan air pada lahannya yang biasanya dalam setahun bisa menanam 3 kali menjadi hanya 2 kali ataupun dari 2 menjadi 1 kali dalam setahun akibat dari perubahan iklim dan kemarau panjang.

Gambar 4. Perkembangan luas tanam komoditas tanaman pangan



Pada tanaman jagung produksinya terus mengalami peningkatan hal ini disebabkan meningkatnya animo petani untuk menanam jagung di Kota Bima. Pemanfaatan lahan tegalan yang biasanya tidak dimanfaatkan menjadi faktor peningkatan produksi jagung selain itu juga tingginya kebutuhan jagung untuk industri terutama industri pakan menjadi salah satu penyebab tingginya animo masyarakat untuk menanam jagung. Pada tanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu pertambahan produksinya tidak terlalu tinggi diakibatkan komoditas-komoditas ini hanya ditanam di waktu sela penanaman padi atau hanya 1 tahun sekali dan juga minat petani untuk menanamnya sangat kurang diakibatkan harga jualnya sangat rendah dan kebanyakan hasil produksinya hanya untuk dikonsumsi bukan untuk dijual.

Pada sektor perkebunan komoditas tanaman tembakau memiliki pertumbuhan produksi yang sangat tinggi terlihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 produksi tembakau selalu berada dibawah 1 ton dan pada tahun 2024 produksi tembakau mampu mencapai 70 ton. Hal ini disebabkan intervensi program peningkatan tanaman perkebunan khususnya tanaman tembakau yang sumber dananya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) pada tahun 2023 dan 2024 mampu menarik minat petani untuk menanam tembakau dengan pelatihan pra panen maupun pasca panen serta membuka akses untuk menjual hasil tembakau dengan harga yang cukup tinggi. Sedangkan pada komoditas kelapa dan mete mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan hal ini diakibatkan umur tanaman yang sudah tua dan tanaman baru belum berbuah /menghasilkan selain itu juga masih kurangnya kemampuan petani untuk mengolah hasil perkebunan menjadi produk lanjutan yang memiliki nilai jual lebih tinggi sehingga daya Tarik komoditas perkebunan masih rendah.

Pada sektor peternakan pertumbuhan paling tinggi adalah produksi komoditas telur, hal ini disebabkan adanya bantuan bibit yang cukup tinggi baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah sehingga populasi ayam petelur terus meningkat. Sedangkan untuk produksi daging mengalami pertumbuhan yang sedikit menurun meskipun jumlah populasi ternak besar seperti sapi kerbau dan kambing terus meningkat akan tetapi data pemotongan hewan untuk mengetahui jumlah daging yang tersedia di Kota Bima sulit dilakukan dikarenakan ada pemotongan yang tidak dilaporkan sehingga menyebabkan data produksi daging tidak sejalan dengan jumlah populasi begitu pula dengan komoditas kulit pelaporan penjualan atas komoditas kulit yang biasanya untuk dijual keluar daerah juga semakin berkurang.

D. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan dari Dinas Pertanian Kota Bima sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Petani

Orang yang bekerja di bidang pertanian, mengelola lahan dan melakukan kegiatan bercocok tanam atau beternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, serta mengelola lingkungan hidup atau orang yang mata pencahariannya adalah mengelola tanah dan sumber daya alam hayati untuk menghasilkan produk pertanian.

2. Kelompok Tani (Poktan)

Kumpulan petani yang bergabung berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya), komoditas, dan keakraban, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka.

3. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Kumpulan beberapa kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha pertanian.

4. Kelompok Wanita Tani (KWT)

Wadah atau organisasi yang beranggotakan para wanita yang bergerak di bidang pertanian, baik dalam kegiatan bercocok tanam maupun mengolah hasil pertanian.

5. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)

Lembaga yang didirikan, dikembangkan, dan dikelola oleh petani sendiri, atau bersama-sama dengan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, serta memperkuat posisi tawar mereka dalam kegiatan ekonomi.

6. Unit Pelayanan Jasa dan Mesin (UPJA)

Lembaga ekonomi yang bergerak dalam menyediakan layanan jasa penggunaan alat dan mesin pertanian untuk membantu petani dalam usaha pertanian, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.

7. Wirausahawan Pertanian

Orang yang melakukan kegiatan bisnis yang berfokus pada sektor pertanian, mencakup semua tahap mulai dari persiapan lahan, budidaya, panen, pengolahan hasil, hingga pemasaran.

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan (*Sebelum Pemberlakuan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan*).

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN		
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
I	BELANJA LANGSUNG	Belanja Pegawai	6.969.308.885	7.019.012.869	6.807.658.040	6.880.637.002	97,68%	98,03%	0,71	1,07
II	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000	400.000	960.000	0	100,00%	0,00%	-58,33	-100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.500.000	80.614.500	53.350.178	74.329.014	75,67%	92,20%	14,35	39,32
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	23.950.000	52.850.000	10.443.580	35.893.244	43,61%	67,92%	120,67	243,69
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93.480.000	80.710.000	92.589.000	80.710.000	99,05%	100,00%	-13,66	-12,83
		Penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service)	48.600.000	48.600.000	47.450.000	47.400.000	97,63%	97,53%	0,00	-0,11
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.250.000	23.202.750	8.250.000	22.075.000	100,00%	95,14%	181,25	167,58
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.625.771	139.510.585	110.596.050	137.228.000	99,97%	98,36%	26,11	24,08
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.663.000	44.663.000	52.454.100	44.502.500	99,60%	99,64%	-15,19	-15,16

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN		
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	9.000.000	3.941.950	8.990.000	98,55%	99,89%	125,00	128,06
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.500.000	17.000.000	31.966.970	16.998.000	78,93%	99,99%	-58,02	-46,83
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	3.820.000	3.820.000	3.120.000	3.220.000	81,68%	84,29%	0,00	3,21
		Penyediaan Makanan dan Minuman	20.460.000	18.500.000	20.439.900	18.489.101	99,90%	99,94%	-9,58	-9,54
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	325.841.729	174.220.000	323.769.822	174.189.186	99,36%	99,98%	-46,53	-46,20
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		35.156.000		33.776.000		96,07%		
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	340.000.000	0	317.717.100	0	93,45%	#DIV/0!	-100,00	-100,00
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	51.250.000	73.950.000	47.492.500	65.079.000	92,67%	88,00%	44,29	37,03
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		42.255.000		40.755.000		96,45%		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	67.000.000	60.500.000	66.943.566	54.720.000	99,92%	90,45%	-9,70	-18,26

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN		
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pelaksanaan Penilaian AKJG	4.300.000	5.550.000	4.300.000	5.550.000	100,00%	100,00%	29,07	29,07
D	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.700.000	117.880.000	26.150.000	102.800.000	85,18%	87,21%	283,97	293,12
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	4.750.000		4.750.000		100,00%		-100,00	-100,00
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	14.250.000	14.310.000		14.310.000	0,00%	100,00%	0,42	
		Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA SKPD	89.700.000	38.040.000	89.700.000	38.040.000	100,00%	100,00%	-57,59	-57,59
		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	29.250.000	27.120.000	29.250.000	27.120.000	100,00%	100,00%	-7,28	-7,28
E	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	50.907.000		49.922.993		98,07%		-100,00	-100,00
		Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	84.905.000		83.930.100		98,85%		-100,00	-100,00
		Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	44.780.000		42.483.861		94,87%		-100,00	-100,00

URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
		Pelaksanaan Lomba Bagi Kelompok Tani dan Petani, Kelompok PUAP serta Pekarangan	63.690.000		61.144.000		96,00%		-100,00	-100,00
F	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar		12.626.200		12.581.200		99,64%		
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian		57.225.085		57.085.185		99,76%		
G	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	74.388.000		73.112.872		98,29%		-100,00	-100,00
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	100.111.900		93.179.311		93,08%		-100,00	-100,00
		Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	177.457.000		175.768.200		99,05%		-100,00	-100,00
		Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	377.110.000		48.067.800		12,75%		-100,00	-100,00
		Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	711.129.500		364.169.950		51,21%		-100,00	-100,00

URAIAN		ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN		
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
		Pengembangan Sistim Informasi Pasar	12.003.200		11.928.200		99,38%		-100,00	-100,00
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	8.866.013.000		8.795.227.200		99,20%		-100,00	-100,00
H	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN.	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	209.060.000		207.684.209		99,34%		-100,00	-100,00
		Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	558.032.800		549.414.800		98,46%		-100,00	-100,00
		Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	47.753.000		47.753.000		100,00%		-100,00	-100,00
		Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija		94.104.000		93.772.900		99,65%		
		Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Pangan		303.820.125		274.011.425		90,19%		
		Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari OPT dan DPI		41.900.000		41.856.900		99,90%		
I	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN									

URAIAN			ANGGARAN PADA TAHUN KE		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
No	PROGRAM	KEGIATAN	2019	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
J	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKE BUNAN LAPANGAN	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	68.052.000		67.760.000		99,57%		-100,00	-100,00
		Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	25.942.000		25.909.000		99,87%		-100,00	-100,00
K	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida		103.829.000		90.811.900		87,46%		
		Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Alat dan Mesin Pertanian/Perkebunan		28.710.000		25.315.000		88,17%		
		Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Lahan dan Air Perkebunan		133.812.300		128.601.050		96,11%		
		Pembinaan dan Fasilitasi Kredit Pembiayaan Pertanian		23.128.000		22.708.000		98,18%		

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan (*Setelah Pemberlakuan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan*).

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.406.572.398	11.848.952.168	12.674.604.518,00	14.708.176.744,66	11.205.392.171	11.675.793.210	12.455.946.901,00	14.353.636.828,00	98,24 %	98,54 %	98,27 %	0,98	16,19%	15,96%
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	110.279.700,00	87.064.000,00	136.362.399,00	129.109.400,66	88.800.000	86.716.300	136.045.465,00	126.759.460,00	80,52 %	99,60 %	99,77 %	98,18 %	33,80%	52,26%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63.692.000,00	66.616.000,00	82.028.399,00	41.438.500,00	59.308.800	66.377.300	81.831.465,00	39.915.660,00	93,12 %	99,64 %	99,76 %	96,33 %	11,23%	18,13%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.614.000,00	240.000,00	4.900.000,00	4.899.800,00	1.786.000	240.000	4.900.000,00	4.899.800,00	31,81 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	1845,94 %	2041466,68%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.413.500,00	2.500.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.386.000	2.500.000	3.320.000,00	3.320.000,00	99,19 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	6,04%	6,63%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.600.000,00	2.019.000,00	2.019.000,00	2.019.000,00	686,000	2.019.000	2.019.000,00	2.019.000,00	26,38 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-22,35%	294214,87%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.607.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	1.174.000,00	744,000	1.174.000	1.174.000,00	1.174.000,00	28,54 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-54,97%	157695,70%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.887.000,00	6.429.000,00	11.829.000,00	7.626.100,66	12.812.000	6.354.000	11.724.000,00	7.361.000,00	99,42 %	98,83 %	99,11 %	96,52 %	22,04%	21,70%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.466.200,00	8.086.000,00	31.092.000,00	68.632.000,00	10.077.200	8.052.000	31.077.000,00	68.070.000,00	51,77 %	99,58 %	99,95 %	99,18 %	266,30%	305,54%
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10.334.884,841	10.890,534,708	11.473.855,061,00	13.187.078,290,00	10.273,545,095	10.735,230,787	11.274.810,073,00	12.914.472,454,00	99,41 %	98,57 %	98,27 %	97,93 %	15,71%	14,37%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.101.369,841,00	10.668,536,708	11.270.209,061,00	12.919.436,990,00	10.041,857,995	10.513,616,787	11.073.744,073,00	12.647.431,405,00	99,41 %	98,55 %	98,26 %	97,89 %	16,13%	14,76%

9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	229.570.000	219.125.000	200.773.000,00	263.547.200,00	228.186.200	218.741.000	198.193.000,00	262.946.949,00	99,40 %	99,82 %	98,71 %	99,77 %	-2,50%	-2,64%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.923.000	1.569.000	1.569.000,00	1.569.000,00	1.513.000	1.569.000	1.569.000,00	1.569.000,00	78,68 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-18,41%	3,70%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.636.000	898,00	898.000,00	898.000,00	1.602.000	898,000	898.000,00	898.000,00	97,92 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99800,05 %	99800,06 %
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	386,00	406,00	406.000,00	1.627.100,00	385,900	406,000	406.000,00	1.627.100,00	99,97 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100005,44 %	100005,46 %
3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>14.288.500</i>	<i>5.214.000,00</i>	<i>8.994.000,00</i>	<i>10.434.000,00</i>	<i>14.288.500</i>	<i>5.214.000</i>	<i>8.964.000,00</i>	<i>10.434.000,00</i>	<i>100,00 %</i>	<i>100,00 %</i>	<i>99,67 %</i>	<i>100,00 %</i>	14,32%	13,88%
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.288.500	5.214.000,00	8.994.000,00	10.434.000,00	14.288.500	5.214.000	8.964.000,00	10.434.000,00	100,00 %	100,00 %	99,67 %	100,00 %	14,32%	13,88%
4	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>20.488.000</i>	<i>15.342.000</i>	<i>15.915.801,00</i>	<i>38.187.000,00</i>	<i>19.393.000</i>	<i>15.342.000</i>	<i>15.837.000,00</i>	<i>38.142.000,00</i>	<i>94,66 %</i>	<i>100,00 %</i>	<i>99,50 %</i>	<i>99,88 %</i>	25,27%	29,28%
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.488.000	15.342.000,00	15.915.801,00	38.187.000,00	19.393.000	15.342.000	15.837.000,00	38.142.000,00	94,66 %	100,00 %	99,50 %	99,88 %	25,27%	29,28%
5	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>378.620.757</i>	<i>370.600,60</i>	<i>502.974.857,00</i>	<i>713.398.054,00</i>	<i>302.928,12</i>	<i>363.779,898</i>	<i>502.631.277,00</i>	<i>710.977.232,00</i>	<i>80,01 %</i>	<i>98,16 %</i>	<i>99,93 %</i>	<i>99,66 %</i>	47,55%	72,07%
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.569.740	696.000,00	696.000,00	50.696.000,00	3.950.100	696.000	684.500,00	50.556.900,00	70,92 %	100,00 %	98,35 %	99,73 %	2307,13 %	100576,37 %
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.236.500	25.880,690,00	135.595.000,00	222.480.000,00	22.110,000	25.863,450	135.341.745,00	221.474.901,00	99,43 %	99,93 %	99,81 %	99,55 %	461,67%	461,48%
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.103.395	8.263.700,00	20.232.000,00	54.916.600,00	12.812,000	7.930.000	20.195.000,00	54.319.127,00	84,83 %	95,96 %	99,82 %	98,91 %	156,69%	172,89%
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.243.122	60.451,670	69.707.857,00	82.585.454,00	32.529,300	55.746,200	69.697.650,00	82.470.100,00	46,98 %	92,22 %	99,99 %	99,86 %	8,77%	102,51%
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	-	-	-	19.334,800	0	0	0	96,67 %	0,00 %	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	0,00%

20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.236.000	272.588.000	274.024.000,00	300.000.000,00	209.607.012	270.824.248	273.994.582,00	299.436.204,00	86,53 %	99,35 %	99,99 %	99,81 %	16,22%	33,47%
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.232.000	2.720.000	2.720.000,00	2.720.000,00	2.585.000	2.720.000	2.717.800,00	2.720.000,00	61,08 %	100,00 %	99,92 %	100,00 %	-35,73%	5,17%
6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	462.287.600	426.824.900	482.404.900,00	543.400.000,00	457.651.227	418.717.350	471.454.900,00	477.860.895,00	99,00 %	98,10 %	97,73 %	87,94 %	9,57%	4,54%
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.957.600	71.844.900	71.844.900,00	100.000.000,00	63.821.227	71.257.350	71.844.900,00	88.510.895,00	95,32 %	99,18 %	100,00 %	88,51 %	20,36%	20,21%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.330.000	354.980.000	410.560.000,00	443.400.000,00	393.830.000	347.460.000	399.610.000,00	389.350.000,00	99,62 %	97,88 %	97,33 %	87,81 %	8,12%	2,38%
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	85.723.000	53.372.500	54.097.500,00	86.570.000,00	48.786.137	50.792.875	46.204.186,00	74.990.787,00	56,91 %	95,17 %	85,41 %	86,62 %	-16,37%	15,85%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.325.000	41.882.500,00	48.817.500,00	80.000.000,00	44.116.137	39.302.875,00	40.924.186,00	68.420.787,00	61,00 %	93,84 %	83,83 %	85,53 %	-4,24%	15,61%
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.398.000	11.490.000,00	5.280.000,00	6.570.000,00	4.670.000	11.490.000,00	5.280.000,00	6.570.000,00	34,86 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-60,14%	100,14%
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	707.409.660	450.276.600	3.568.730.297,00	3.612.350.700,00	685.872.625	447.979.800	3.544.170.730,00	3.406.774.861,00	96,96 %	99,49 %	99,31 %	94,31 %	656,62%	655,17%
8	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	321.600.960	237.919.300	3.070.476.897,00	2.912.223.000,00	314.141.125	237.258.400	3.049.517.330,00	2.755.595.494,00	97,68 %	99,72 %	99,32 %	94,62 %	1162,82 %	1157,63 %
26	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	155.031.460	78.819.300	358.687.940,00	2.800.103.000,00	152.071.625	78.296.400	345.947.753,00	2.672.778.644,00	98,09 %	99,34 %	96,45 %	95,45 %	532,80%	517,53%
27	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	166.569.500	159.100.000	2.711.788.957,00	112.120.000,00	162.069.500	158.962.000	2.703.569.577,00	82.816.850,00	97,30 %	99,91 %	99,70 %	73,86 %	1568,02 %	1566,54 %
9	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	6.007.700	-	-	22.506.950,00	6.007.700	0	0	22.506.950,00	100,00 %	0,00 %		100,00 %	0,00%	0,00%
28	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6.007.700	-	-	22.506.950,00	6.007.700			22.506.950,00	100,00 %	0,00 %		100,00 %	0,00%	#DIV/0!

10	<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-	13.060.800	13.059.700,00	32.879.950,00	0	13.059.900	13.058.200,00	28.559.950,00	0,00%	99,99%	99,99%	86,86%	0,00%	0,00%
29	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		6.979.900	6.979.200,00	20.289.850,00		6.979.900	6.977.700,00	15.969.850,00	0,00%	100,00%	99,98%	78,71%	0,00%	0,00%
30	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak		6.080.900	6.080.500,00	12.590.100,00		6.080.000	6.080.500,00	12.590.100,00	0,00%	99,99%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
11	<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	5.654.000	39.196.500	28.995.700,00	39.741.300,00	5.654.000	37.936.500	28.995.700,00	39.494.600,00	100,00%	0,00%	100,00%	99,38%	579,58%	559,47%
31	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	5.654.000	1.080.000	1.080.000,00		5.654.000	720.000	1.080.000,00		0,00%	66,67%	100,00%	#DIV/0!	-114,23%	149766,68%
32	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		38.116.500	27.915.700,00	39.741.300,00		37.216.500	27.915.700,00	39.494.600,00	0,00%	97,64%	100,00%	99,38%	0,00%	0,00%
11	<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	374.147.000	160.100,00	456.198.000,00	604.999.500,00	360.069,800	159.725,000	452.599.500,00	560.617.867,00	96,24%	0,00%	99,21%	92,66%	138,61%	135,68%
33	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	374.147.000	160.100,00	456.198.000,00	604.999.500,00	360.069,800	159.725,000	452.599.500,00	560.617.867,00	0,00%	99,77%	99,21%	92,66%	138,61%	135,68%
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15.414.000	20.808,700	124.400.800,00	3.683.936,000	15.234,000	20.378,700	124.206.070,00	2.229.315,492,00	98,83%	0,00%	99,84%	60,51%	1486,61%	1108,21%
12	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	15.414.000	20.808,700	20.800.800,00	3.683.936,000	15.234,000	20.378,700	20.800.800,00	2.229.315,492,00	98,83%	0,00%	100,00%	60,51%	5905,14%	3574,99%
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	15.414.000	20.808,700	20.800.800,00	3.683.936,000	15.234,000	20.378,700	20.800.800,00	2.229.315,492,00	0,00%	97,93%	100,00%	60,51%	5905,14%	3574,99%
	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>			103.600.000,00	0			103.405.270,00	0			99,81%		0,00%	0,00%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			100.000.000,00				99.805.270,00				99,81%		0,00%	0,00%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			3.600.000,00				3.600.000,00				100,00%		0,00%	0,00%

I V	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	117.934.785	198.718.591	254.958.524,00	315.872.394,00	116.831.190	196.815.100	231.485.450,00	293.525.244,00	99,06 %	0,00 %	90,79 %	92,93 %	104,76%	95,01%
13	<i>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	54.141.445	143.133.836	190.660.224,00	131.519.664,00	53.638.450	141.514.200	173.667.150,00	131.107.994,00	99,07 %	0,00 %	91,09 %	99,69 %	187,23%	178,38%
35	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	45.012.445	128.795.830	176.322.224,00		44.627.950	127.177.200	159.329.150,00		0,00 %	98,74 %	90,36 %		189,70%	176,92%
36	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.129.000	14.338.006	14.338.000,00		9.010.500	14.337.000	14.338.000,00		0,00 %	99,99 %	100,00 %		23,73%	25,79%
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				17.755.450,00				17.755.450,00				100,00 %	0,00%	0,00%
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				113.764.214,00				113.352.544,00				99,64 %	0,00%	0,00%
14	<i>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	7.785.740	10.324.355	10.324.000,00	40.010.230,00	7.785.740	10.321.500	10.324.000,00	39.080.230,00	100,00 %	0,00 %	100,00 %	97,68 %	128,45%	125,44%
37	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	7.785.740	10.324.355	10.324.000,00	40.010.230,00	7.785.740	10.321.500	10.324.000,00	39.080.230,00	0,00 %	99,97 %	100,00 %	97,68 %	128,45%	125,44%
15	<i>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	56.007.600	45.260.400	53.974.300,00	144.342.500,00	55.407.000	44.979.400	47.494.300,00	123.337.020,00	98,93 %	0,00 %	87,99 %	85,45 %	55,87%	40,00%
38	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	15.797.000	17.610.500	15.450.700,00		15.797.000	17.610.500	8.970.700,00	20.233.500,00	0,00 %	100,00 %	58,06 %		-34,12%	4,27%
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				32.263.800,00								0,00 %	0,00%	0,00%
39	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	40.210.600	27.649.900	38.523.600,00	112.078.700,00	39.610.000	27.368.900	38.523.600,00	103.103.520,00	0,00 %	98,98 %	100,00 %	91,99 %	71,73%	65,73%
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	525.555.360	189.517.000	213.743.378,00	2.880.000,00	502.465.100	187.606.000	212.893.399,00	0	95,61 %	0,00 %	99,60 %	0,00 %	-84,04%	-82,52%
16	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	525.555.360	189.517.000	213.743.378,00	2.880.000,00	502.465.100	187.606.000	212.893.399,00	0	95,61 %	0,00 %	99,60 %	0,00 %	-84,04%	-82,52%

40	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	20.813.200	45.991.800	78.877.578,00	2.880.000,00	14.447.700	45.913.400	78.254.399,00	0	0,00%	99,83%	99,21%	0,00%	160,36%	254,90%
41	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	504.742.160	143.525.200	134.865.800,00		488.017.400	141.692.600	134.639.000,00		0,00%	98,72%	99,83%		-110,93%	-109,28%
V I	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	36.479.400	46.367.800	48.236.000,00	24.639.900,00	32.169.200	42.848.000	48.174.500,00	22.752.900,00	88,18%	0,00%	99,87%	92,34%	14,83%	28,04%
17	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usuhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	36.479.400	46.367.800	48.236.000,00	24.639.900,00	32.169.200	42.848.000	48.174.500,00	22.752.900,00	88,18%	0,00%	99,87%	92,34%	14,83%	28,04%
42	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	16.918.600	14.498.800	16.455.800,00	24.639.900,00	14.299.000	13.958.000	16.425.800,00	22.752.900,00	0,00%	96,27%	99,82%	92,34%	15,77%	28,14%
43	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	19.560.800	31.869.000	31.780.200,00		17.870.200	28.890.000	31.748.700,00		0,00%	90,65%	99,90%		29,31%	38,23%
V II	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	75.108.400	90.267.000	217.496.245,00	483.468.716,34	74.903.900	89.704.000	215.874.804,00	429.822.946,00	99,73%	0,00%	99,25%	88,90%	201,89%	193,45%
18	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	75.108.400	90.267.000	217.496.245,00	483.468.716,34	74.903.900	89.704.000	215.874.804,00	429.822.946,00	99,73%	0,00%	99,25%	88,90%	201,89%	193,45%
44	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	19.898.200	45.810.000	47.714.000,00	86.981.500,00	19.864.700	45.809.000	47.515.000,00	84.981.500,00	0,00%	100,00%	99,58%	97,70%	161,81%	160,61%
45	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	15.331.200	17.500.100	62.785.200,00	298.232.516,34	15.331.200	17.500.100	62.609.704,00	282.117.930,00	0,00%	100,00%	99,72%	94,60%	397,92%	388,78%
46	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	32.656.000	17.082.000	33.097.200,00	98.254.700,00	32.491.000	16.880.000	33.097.200,00	62.723.516,00	0,00%	98,82%	100,00%	63,84%	111,69%	77,86%
47	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	7.223.000	9.874.900	73.899.845,00		7.217.000	9.514.900	72.652.900,00		0,00%	96,35%	98,31%		651,74%	662,08%
	JUMLAH	12.884.474,03	12.844.907,859	17.102.169,762,00	22.831.324,455,00	12.632.868,186	12.661.124,810	16.832.751,854,00	20.735.828,271,00	98,05%	98,57%	98,42%	90,82%	44,00%	40,90%

Pada tabel 5 anggaran dan realisasi pendanaan perangkat daerah Dinas Pertanian Kota Bima setelah Permendagri no. 90 tahun 2019 dengan rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2021-2024 sebesar 96.46% atau dikatakan baik karena rata-rata atas realisasi program dan kegiatan diatas 90% baik, pada pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pertanian atau program kesekretariatan maupun program teknis pertanian. Artinya kinerja pengelolaan pendanaan perangkat daerah Dinas Pertanian Kota Bima dapat dikatakan BAIK, meskipun dari segi prosedur dan mekanisme pelayanan pertanian dapat dikatakan baik namun dari segi jumlah (sumber daya manusia) masih kurang. Rata-rata pertumbuhan total anggaran tahun 2021- 2024 sebesar 44,00% sementara untuk pertumbuhan realisasi sebesar 40,90%.

2. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap segala kendala dan hambatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

B.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Status Luas kepemilikan dan alih fungsi lahan	Menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.	Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum; (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan; dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah.
	Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian	Keterbatasan akses Petani Terhadap Lembaga Permodalan dan Pasar	Masih Rendahnya Daya Saing Kompetitif dan Komparatif
	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Pertanian	Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian masih kurang karena kurangnya media informasi dan upgrade ilmu, skill dan ketrampilan serta teknologi pertanian yang dimiliki oleh pegawai lingkup Dinas Pertanian kota Bima.	Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.
	Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian	Belum adanya konsep wawasan pertanian terpadu (integrated farming system) dalam membangun pertanian.	Secara kelembagaan, kelompok tani masih lemah, hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani.
	Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Permasalahan Ekologi/lingkungan	Perubahan iklim pada zaman sekarang menjadi kendala yang serius karena iklim
	Fluktuasi Harga Pangan	Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, persaingan permintaan misalnya melonjaknya harga pangan.	Harga jual yang sangat fluktuatif sangat mempengaruhi inflasi.

Ketersediaan Pangan Kurang Memadai	Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat.	Pertumbuhan penduduk menjadi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan produksi bahan pangan, sementara itu penduduk menuntut adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, harga terjangkau, dan tersedia setiap saat.
Pendidikan dan Usia Petani	Pendidikan dan usia petani menjadi masalah penting untuk keberlanjutan sumber daya petani yang mampu menghasilkan komoditas pertanian yang berkualitas. Permasalahan utama ketenagakerjaan di sektor pertanian, yaitu keberadaan usia tenaga kerja produktif dan tingkat pendidikan	tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak sekolah sampai yang tamat Sekolah Dasar mencapai 66,42%, disusul oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebesar 16,13% dan lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 14,33%. Dengan pendidikan yang masih didominasi SLTP ke bawah dan munculnya kelompok petani baru yang belum berpengalaman, diperlukan strategi dalam peningkatan kompetensi, kreativitas dan inovasi melalui pelatihan vokasi (vocational training), serta dilakukan mentoring terhadap pelaku usaha pertanian baru.
Kemiskinan Perdesaan	Pembangunan pertanian selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghasil devisa nasional melalui ekspor, juga sebagai faktor utama pertumbuhan wilayah perdesaan.	Saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di perdesaan

a. Permasalahan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Status, Luas Kepemilikan dan Alih Fungsi Lahan

Masih berlakunya sistem pewarisan tanah yang mengakibatkan semakin sempitnya penguasaan dan pengusahaan lahan; banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan dan menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

2. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Prasarana

Ketersediaan infrastruktur (prasarana dan sarana pertanian) belum memadai yang diakibatkan oleh faktor-faktor masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur dan sarana prasarana. Pembiayaan adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan usaha pertanian yang menguntungkan dan berkelanjutan. Namun demikian aksesibilitas petani terhadap pembiayaan merupakan masalah

utama yang sering dikeluhkan oleh petani. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang berbagai skema pembiayaan yang dapat diakses oleh petani

3. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Pertanian.

Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian masih kurang karena kurangnya media informasi dan upgrade ilmu, skill dan ketrampilan serta teknologi pertanian yang dimiliki oleh pegawai lingkup Dinas Pertanian kota Bima.

4. Keterbatasan akses Petani Terhadap Lembaga Permodalan dan Pasar.

Masalah kekurangan modal yang dihadapi petani menjadi isu klasik karena memang sifat usaha bidang pertanian belum mendapat dukungan yang penuh dari pihak perbankan. Ketidakmampuan petani untuk mengakses sumber pemodal formal diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan dari kondisi ini adalah bagaimana berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan agar berpihak dan mau menyalurkan modalnya ke sektor pertanian.

5. Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian.

Belum adanya konsep wawasan pertanian terpadu (integrated farming system) dalam membangun pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan) serta dukungan dari perindustrian guna mencapai sistem agribisnis.

6. Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Perubahan iklim pada zaman sekarang merupakan menjadi kendala yang serius karena iklim.

7. Masih Rendahnya Daya Saing Kompetitif dan Komparatif

Pada dasarnya kepada tersedianya pasar dan informasi harga, kondisi yang selalu fluktuatif yang bergantung pada tengkulak dan pedagang yang sering merugikan petani.

8. Masih Tingginya Penggunaan Pupuk dan Pestisida an Organik

Masih lemahnya penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang ditandai antara lain dengan penggunaan pupuk dan bahan kimia anorganik yang berlebihan serta perkembangan teknologi seringkali menyebabkan tergerusnya kearifan lokal dan potensi sumberdaya lokal.

- b. Permasalahan Utama Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan)**

1. Ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan peternakan yang terintegrasi belum memadai.

Ketika suatu sistem peternakan dikelola, maka daya dukung lahan sebagai pemasok hijauan harus dipikirkan. Sebaiknya suatu peternakan harus memiliki lahan hijauan tersendiri agar daya dukung lahan dapat dikelola dengan baik untuk pemenuhan kebutuhan hijauan ternak. Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan daya dukung lahan terhadap ketersediaan hijauan untuk produktivitas ternak. Faktor-faktor tersebut adalah 1) Kesuburan lahan; 2) Kondisi dan jenis tanaman yang tersedia; 3) Jenis dan Kondisi ternak; 4) Kondisi iklim. Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena tidak ada regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang mulai maju usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha yang lain. Sehubungan hal di atas dan menjamin kebutuhan pangan nasional asal ternak, maka usaha peternakan harus maju dan berkembang. Salah satu syaratnya adalah peternakan harus diberi lahan dengan cara memberi kepastian dalam RTRW untuk ruang peternakan. Ketersediaan lahan inilah yang menjadi penghambat dalam pengembangan peternakan yang terintegrasi. Adanya tanah/lahan pangangan yang difungsikan di luar keperluan peternakan menyebabkan semakin sempitnya ruang bagi perluasan areal peternakan. Sehingga perlu didorong untuk mengembangkan kawasan peternakan rakyat yang terintegrasi melalui optimalisasi fungsi lahan pangangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam pengembangan kawasan ini perlu juga diimplementasikan adanya integrasi peternakan dengan tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan. Adanya integrasi tersebut akan memberikan manfaat saling menguntungkan berupa penyediaan pupuk kandang bagi tanaman serta limbah pertanian sebagai sumber pakan bagi ternak.

2. Penyediaan Bibit Unggul

Produktivitas ternak masyarakat khususnya ternak local (terutama sapi potong) belum optimal sehingga masih diperlukan upaya fasilitasi dalam pengembangan perbibitan secara terstruktur dan terarah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kendala tersebut adalah masih tingginya gangguan reproduksi pada ternak betina, masih adanya pemotongan betina produktif dan keterbatasan SDM (Medis Veteriner/Dokter Hewan dan

Paramedis Veteriner) serta Sarana Prasarana UPT Perbibitan Ternak Daerah. Guna mendorong peningkatan penyediaan bibit unggul di daerah, perlu dilakukan beberapa upaya diantaranya Optimalisasi IB (Gertak Berahi IB), Pengawasan Peredaran Bibit dan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit. Berkenaan dengan pengembangan sumberdaya genetik lokal, juga perlu didorong untuk melakukan pemurnian terhadap jenis ternak tersebut.

3. Kelembagaan Kelompok Tani Ternak

Secara kelembagaan, kelompok tani ternak yang ada masih lemah. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan serta wawasan petani ternak.

4. Sarana Prasarana Pendukung Peternakan

Ketersediaan sarana prasarana pendukung usaha peternakan baik di sub sistem hulu maupun hilir seperti unit perbibitan, kebun HMT, Sumber Air, Jalan Produksi, Puskesmas, Pos IB, Fasilitas Pengolahan Limbah, Padang Penggembalaan, pasar ternak, rumah potong hewan belum memadai.

5. Permodalan peternak

Lemahnya permodalan peternak, diakibatkan oleh faktor keterbatasan akses terhadap sumber permodalan selain dari pemerintah.

6. Kualitas dan Kuantitas produk belum dapat mendukung berkembangnya agroindustry

Dengan produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya efisiensi produksi sehingga menyebabkan nilai tambah kurang memadai, sehingga sulit bersaing untuk meningkatkan kualitas produk.

7. Belum Optimalnya Penanganan Kesehatan Hewan dan Rehabilitasi Reproduksi

Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya peningkatan populasi ternak adalah mengetahui status reproduksi ternak, dalam hal ini fertilitas dan pemeriksaan kebuntingan. Pemeriksaan infertilitas yang tidak tepat akan berimplikasi pada kegagalan treatment infertilitas yang diberikan. Demikian pula, pemeriksaan kebuntingan yang tidak akurat menyebabkan days open yang lebar. Lebih lanjut berakibat pada rendahnya angka kebuntingan.

8. Belum optimalnya pengawasan terhadap produk pangan asal hewan.

Pengawasan Prosedur pemasukan produk pangan hewani bertujuan agar aparat pemerintah maupun masyarakat memperhatikan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. Permasalahan Utama Bidang Perkebunan

1. Terjadinya penurunan daya dukung lahan sebagai akibat dari kurang diperhatikannya pengelolaan sumberdaya lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi, sehingga muncul lahan-lahan potensial kritis dan kurang produktif;
2. Kelembagaan petani perkebunan belum tertata dan terbina secara baik, sehingga fungsi kelembagaan belum dapat berjalan dengan baik;
3. Populasi tanaman perkebunan rakyat, belum memenuhi standar baku budidaya tanaman;
4. Masih kurangnya infrastruktur perkebunan;
5. Rendahnya luasan kepemilikan lahan petani perkebunan yang diperkirakan rata-rata 0,20 Ha;
6. Belum optimalnya diversifikasi pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan;

B. Isu strategis

1. Lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
2. Semakin berkurangnya sumber daya air sebagai sumber air irigasi yang berdampak pada menurunnya areal tanam;
3. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumber daya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian;
4. Kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran;
5. Semakin menurunnya produksi dan kualitas tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias dan obat-obatan/empon-empon);
6. Semakin rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi, Kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar;
7. Kurangnya penerapan industrialisasi pengolahan produk hasil pertanian;
8. Belum adanya kegiatan usaha pertanian yang berwawasan agroindustri.
9. Pemasaran hasil produk yang masih sangat fluktuatif;
10. Sering terjadi kendala dalam pemasaran produk olahan hasil pertanian;

11. Minimnya kerjasama dan koordinasi dengan pelaku usaha pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian;
12. Kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak yang perlu terus ditingkatkan.

BAB 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Kota Bima Yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan ”, dan dalam menunjang pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan misi " Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan dan Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan.

Dengan rumusan visi tersebut di atas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025–2029) diharapkan kondisi pembangunan pertanian di Kota Bima mengalami perubahan dan lompatan secara signifikan yang diindikasikan oleh 2 (dua) indikator keberhasilan utama, yaitu :

- a. Tercapainya swasembada dan berkelanjutan yang ditandai dengan makin meningkatnya produktivitas lahan dan kualitas produksi komoditi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- b. Masyarakat yang maju dan mandiri, ditandai dengan adanya kemajuan dalam hal tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan pendapatan petani dan pelaku usaha pertanian serta ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai.

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang pertanian.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima adalah menggambarkan rumusan situasi yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Bima selama 5 (lima) tahun ke depan, adapun Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima selama 5 (lima) tahun ke depan dapat disajikan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 7 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kota Bima.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan produksi sektor pertanian	Nilai PDRB sektor pertanian	Meningkatnya produksi pertanian	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	9,50	9,54	9,58	9,62	9,64

2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Tabel 8. Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian Kota Bima

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	1. Penguatan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, florikultura dan biofarmaka	1. Peningkatan luas tanam tanaman pangan, hortikultura, florikultura dan biofarmaka; 2. Pengembangan perbibitan/perbenihan; 3. Peningkatan produktivitas.
		2. Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan teknologi;	1. Perlindungan petani dan akses permodalan; 2. Peningkatan SDM petani.
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;	1. Penerapan teknologi panen dan pasca panen; 2. Penerapan standar mutu hasil pertanian melalui penerapan GAP, GHP, registrasi lahan; 3. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan melalui integrasi kawasan budidaya dengan sentra pengolahan;
		4. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani.	1. Penerapan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu; 2. Revitalisasi sarana dan kelembagaan pasar produk pertanian (pasar tani, sub terminal agribisnis) melalui promosi produk pertanian, stabilisasi harga, pengembangan jaringan pasar yang terintegrasi, pelayanan informasi pasar dan kemitraan
		5. Penguatan sentra produksi komoditi perkebunan.	1. Peningkatan luas tanam komoditi perkebunan; 2. Pengembangan perbibitan/perbenihan; 3. Peningkatan produktivitas.
		6. Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan teknologi;	1. Perlindungan petani dan akses permodalan; 2. Peningkatan SDM petani
		7. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;	1. Penerapan teknologi panen dan pasca panen; 2. Penerapan standar mutu hasil pertanian melalui penerapan GAP, GHP, registrasi lahan; 3. Peningkatan nilai tambah melalui

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			pengolahan melalui integrasi kawasan budidaya dengan sentra pengolahan;
		8. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu; 2. Promosi produk perkebunan, stabilisasi harga, pengembangan jaringan pasar yang terintegrasi, pelayanan informasi pasar dan kemitraan
		9. Menumbuhkembangkan sentra-sentra produksi peternakan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri); 2. Peningkatan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan; 3. Revitalisasi/optimalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan; 4. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan; 5. Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi penambahan komoditas; 6. Penetapan dan penumbuhkembangan kawasan/sentra peternakan berdasarkan potensinya 7. Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan 8. Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan akses terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.

BAB 4

Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima dalam kurun waktu tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025–2029 mengacu pada VISI dan MISI Pemerintah Kota Bima dan RPJMD 2025 - 2029 Kota Bima dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

URUSAN / UNSUR	BIDANG BIDANG UNSUR URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
X	XX	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
X	XX	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

URUSAN / UNSUR	BIDANG BIDANG UNSUR URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
X	XX	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
X	XX	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
X	XX	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X	XX	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X	XX	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X	XX	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X	XX	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X	XX	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X	XX	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

URUSAN / UNSUR	BIDANG BIDANG UNSUR URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X	XX	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X	XX	1	2.07	5	Pengadaan Mebel
X	XX	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN / UNSUR	BIDANG BIDANG UNSUR URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
X	XX	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X	XX	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

URUSAN / UNSUR	BIDANG BIDANG UNSUR URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, BahanPakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	2	2.05	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
3	27	2	2.06	3	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

URUSAN / UNSUR	BIDANG BIDANG UNSUR URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
3	27	3	2.01	5	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3	27	3	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

URUSAN / UNSUR	BIDANG BIDANG UNSUR URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	27	4	2.04		PROGRAM KESEHATAN KESEHATAN VETERINER PENGENDALIAN HEWAN DAN MASYARAKAT
3	27	4	2.01	5	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan <i>Zoonosis</i> pada Hewan
3	27	4	2.01	8	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan <i>Zoonosis</i> dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3	27	4	2.04	10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

URUSAN / UNSUR	BIDANG BIDANG UNSUR URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
3	27	6	2.01	5	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

URUSAN / UNSUR	BIDANG BIDANG UNSUR URUSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
3	27	7	2.01	6	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 9. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan Dinas Pertanian Tahun 2025 – 2029.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun Renstra
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		
				Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotora	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	13.939.003.955,00	100	15.332.904.350,50	100	16.866.194.785,55	100	18.552.814.264,11	100	19.305.436.662,23	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dan koordinasi penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD Dinas Pertanian	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100	100	28.217.100,00	100	31.038.810,00	100	34.142.691,00	100	37.556.960,10	100	41.312.656,11	100
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (setahun)	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	4 dokumen	8.309.500,00	4 dokumen	9.140.450,00	4 dokumen	10.054.495,00	4 dokumen	11.059.944,50	4 dokumen	12.165.938,95	20 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100	1 dokumen	3.778.600,00	1 dokumen	4.156.460,00	1 dokumen	4.572.106,00	1 dokumen	5.029.316,60	1 dokumen	5.532.248,26	5 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	1 dokumen	2.761.000,00	1 dokumen	3.037.100,00	1 dokumen	3.340.810,00	1 dokumen	3.674.891,00	1 dokumen	4.042.380,10	5 dokumen

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100	1 dokumen	1.476.000,00	1 dokumen	1.623.600,00	1 dokumen	1.785.960,00	1 dokumen	1.964.556,00	1 dokumen	2.161.011,60	5 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	1 dokumen	844.000,00	1 dokumen	928.400,00	1 dokumen	1.021.240,00	1 dokumen	1.123.364,00	1 dokumen	1.235.700,40	5 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	4 Laporan	605.000,00	4 Laporan	665.500,00	4 Laporan	732.050,00	4 Laporan	805.255,00	4 Laporan	885.780,50	20 laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	4 Laporan	10.443.000,00	4 Laporan	11.487.300,00	4 Laporan	12.636.030,00	4 Laporan	13.899.633,00	4 Laporan	15.289.596,30	20 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan administrasi dan penatakelolaan keuangan Dinas Pertanian	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi dan tatakelola keuangan OPD Dinas Pertanian	100	100	13.141.151.802,00	100	14.455.266.982,20	100	15.900.793.680,42	100	17.490.873.048,46	100	19.239.960.353,31	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersediaya Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	12.893.793.702,00	100	14.183.173.072,20	100	15.601.490.379,42	100	17.161.639.417,36	100	18.877.803.359,10	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	100	244.440.000,00	100	268.884.000,00	100	295.772.400,00	100	325.349.640,00	100	357.884.604,00	100

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	1 dokumen	1.097.000,00	1 dokumen	1.206.700,00	1 dokumen	1.327.370,00	1 dokumen	1.460.107,00	1 dokumen	1.606.117,70	4 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	16 Laporan	670.100,00	16 Laporan	737.110,00	16 Laporan	810.821,00	16 Laporan	891.903,10	16 Laporan	981.093,41	80 laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	3 laporan	1.151.000,00	3 laporan	1.266.100,00	3 laporan	1.392.710,00	3 laporan	1.531.981,00	3 laporan	1.685.179,10	15 laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	100	100	5.356.000,00	100	5.891.600,00	100	6.480.760,00	100	7.128.836,00	100	7.841.719,60	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terdokumentasinya barang milik daerah dengan tertib dan baik	100	100	5.356.000,00	100	5.891.600,00	100	6.480.760,00	100	7.128.836,00	100	7.841.719,60	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan administrasi Kepegawaian Dinas Pertanian	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi kepegawaian OPD Dinas Pertanian			11.148.100,00		12.262.910,00		13.489.201,00		14.838.121,10		16.321.933,21	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase peningkatan kinerja pegawai	100	100	11.148.100,00	100	12.262.910,00	100	13.489.201,00	100	14.838.121,10	100	16.321.933,21	100

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa pada Dinas Pertanian	Persentase ketercapaian penatausahaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa pada OPD Dinas Pertanian			226.000.953,00		248.601.048,30		273.461.153,13		300.807.268,44			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	100	531.000,00	100	584.100,00	100	642.510,00	100	706.761,00	100	777.437,10	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	48.513.000,00	100	53.364.300,00	100	58.700.730,00	100	64.570.803,00	100	71.027.883,30	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100	10.652.500,00	100	11.717.750,00	100	12.889.525,00	100	14.178.477,50	100	15.596.325,25	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	72.276.453,00	100	79.504.098,30	100	87.454.508,13	100	96.199.958,94	100	105.819.954,84	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	92.124.000,00	100	101.336.400,00	100	111.470.040,00	100	122.617.044,00	100	134.878.748,40	100
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100	1.904.000,00	100	2.094.400,00	100	2.303.840,00	100	2.534.224,00	100	2.787.646,40	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas Pertanian	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas Pertanian			452.350.000,00		497.585.000,00		547.343.500,00		602.077.850,00			

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	17 Rekening	100.000.000,00	17 Rekening	110.000.000,00	17 Rekening	121.000.000,00	17 Rekening	133.100.000,00	17 Rekening	146.410.000,00	17 Rekening
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100	100	352.350.000,00	100	387.585.000,00	100	426.343.500,00	100	468.977.850,00	100	515.875.635,00	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pada OPD Dinas Pertanian	Persentase ketercapaian ketersediaan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pada OPD Dinas Pertanian			74.780.000,00		82.258.000,00		90.483.800,00		99.532.180,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	100	68.200.000,00	100	75.020.000,00	100	82.522.000,00	100	90.774.200,00	100	99.851.620,00	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100	6.580.000,00	100	7.238.000,00	100	7.961.800,00	100	8.757.980,00	100	9.633.778,00	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100	10.000.000,00	100	11.000.000,00	100	12.100.000,00	100	13.310.000,00	100	14.641.000,00	100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan sarana pertanian yang memadai	1.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,02%	8,21%	4.108.653.430,00	8,25%	4.256.586.101,50	0,08	4.464.415.406,58	8,33%	4.682.636.176,90	0,08	4.911.767.985,75	8,37%
		2. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	31,73%	29,46%		29,50%		0,30		29,58%		0,30		29,62%

		3.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	40,08 %	54,70%		54,74%		0,55		54,82%		0,55		54,86%
<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>Meningkatnya pengawasan penggunaan sarana pertanian sesuai anjuran</i>	<i>Jumlah pemanfaatan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian</i>	2 Laporan	2 Laporan	2.974.188.080,00	2 Laporan	3.122.897.484,00	2 Laporan	3.279.042.358,20	2 Laporan	3.442.994.476,11	2 Laporan	3.615.144.199,92	10 Laporan
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	1 Laporan	1 Laporan	2.914.535.080,00	1 Laporan	3.060.261.834,00	1 Laporan	3.213.274.925,70	1 Laporan	3.373.938.671,99	1 Laporan	3.542.635.605,58	5 Laporan
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1 Laporan	1 Laporan	59.653.000,00	1 Laporan	62.635.650,00	1 Laporan	65.767.432,50	1 Laporan	69.055.804,13	1 Laporan	72.508.594,33	5 Laporan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	1 Laporan	8.004.100,00	1 Laporan	8.404.305,00	1 Laporan	8.824.520,25	1 Laporan	9.265.746,26	1 Laporan	9.729.033,58	5 Laporan
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	8.004.100,00	2 Dokumen	8.404.305,00	2 Dokumen	8.824.520,25	2 Dokumen	9.265.746,26	2 Dokumen	9.729.033,58	10 Dokumen
<i>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam</i>	<i>Meningkatnya peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu</i>	<i>Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu</i>	6 Laporan	6 Laporan	948.544.950,00	6 Laporan	995.972.197,50	6 Laporan	1.045.770.807,38	6 Laporan	1.098.059.347,74	6 Laporan	1.152.962.315,13	30 Laporan

<i>Daerah Kabupaten/Kota</i>														
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/tanaman Skala Kecil	4 laporan	4 laporan	939.554.850,00	4 laporan	986.532.592,50	4 laporan	1.035.859.222,13	4 laporan	1.087.652.183,23	4 laporan	1.142.034.792,39	20 Laporan
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit hijauan Pakan Ternak yang beredar	2 Laporan	2 Laporan	8.990.100,00	2 Laporan	9.439.605,00	2 Laporan	9.911.585,25	2 Laporan	10.407.164,51	2 Laporan	10.927.522,74	10 Laporan
<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran bibit dan hijauan pakan ternak</i>	<i>Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar teknis</i>	4 Laporan	4 Laporan	27.916.300,00	4 Laporan	29.312.115,00	4 Laporan	30.777.720,75	4 Laporan	32.316.606,79	4 Laporan	33.932.437,13	20 Laporan
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	4 Laporan	27.916.300,00	4 Laporan	29.312.115,00	4 Laporan	30.777.720,75	4 Laporan	32.316.606,79	4 Laporan	33.932.437,13	20 Laporan
<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain</i>	<i>Meningkatnya Ketersediaan benih/bibit unggul ternak</i>	<i>Jumlah Pengadaan bibit unggul bermutu</i>	1093 ekor	15 ekor	150.000.000,00	15 ekor	100.000.000,00	15 ekor	100.000.000,00	15 ekor	100.000.000,00	15 ekor	100.000.000,00	75 ekor
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/Kota Lain	1093 ekor	15 ekor	150.000.000,00	15 ekor	100.000.000,00	15 ekor	100.000.000,00	15 ekor	100.000.000,00	15 ekor	100.000.000,00	75 ekor

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian yang memadai	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	50%	52%	3.099.678.075,00	54%	3.254.661.978,75	0,56	3.417.395.077,69	58%	3.588.264.831,57	0,60	3.767.678.073,15	60%
Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Pengembangan prasarana pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	23 Paket	23 Paket	3.099.678.075,00	20 Paket	3.254.661.978,75	20 Paket	3.417.395.077,69	20 Paket	3.588.264.831,57	20 Paket	3.767.678.073,15	103 Paket
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung lainnya	23 dokumen	23 dokumen	3.099.678.075,00	20 Dokumen	3.254.661.978,75	20 Dokumen	3.417.395.077,69	20 Dokumen	3.588.264.831,57	20 Dokumen	3.767.678.073,15	103 dokumen
Pembangunan Prasarana Pertanian	Meningkatnya pembangunan prasarana pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/terpelihara												
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terlaksananya pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		2 paket	0,00	2 paket	300.000.000,00	2 paket	330.000.000,00	2 paket	363.000.000,00	2 paket	399.300.000,00	10 paket
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun/ direhabilitasi/dipelihara		3 Paket	0,00	3 Paket	100.000.000,00	3 Paket	110.000.000,00	3 Paket	121.000.000,00	3 Paket	133.100.000,00	15 paket
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah jaringan embung pertanian terbangun/ direhabilitasi/dipelihara		2 paket	0,00	2 paket	300.000.000,00	2 paket	330.000.000,00	2 paket	363.000.000,00	2 paket	399.300.000,00	10 Paket
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		2 paket	0,00	2 paket	180.000.000,00	2 paket	198.000.000,00	2 paket	217.800.000,00	2 paket	239.580.000,00	10 Paket

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kejadian dan kasus penyakit menular hewan ternak	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	57,34 %	58,36%	232.036.187,00	59,38%	273.593.854,35	0,60	326.216.162,47	61,42%	393.152.370,61	0,62	478.623.009,17	62,44%
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	2 Laporan	2 Laporan	119.823.432,00	2 Laporan	155.770.461,60	2 Laporan	202.501.600,08	2 Laporan	263.252.080,10	2 Laporan	342.227.704,14	10 Laporan
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	5 Wilayah	5 Wilayah	17.755.387,00	5 Wilayah	23.082.003,10	5 Wilayah	30.006.604,03	5 Wilayah	39.008.585,24	5 Wilayah	50.711.160,81	5 Wilayah
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Wilayah	5 Wilayah	102.068.045,00	5 Wilayah	132.688.458,50	5 Wilayah	172.494.996,05	5 Wilayah	224.243.494,87	5 Wilayah	291.516.543,32	5 Wilayah
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner di Kota Bima	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50%	50%	24.534.255,00	50%	25.760.967,75	0,50	27.049.016,14	50%	28.401.466,94	0,50	29.821.540,29	50%
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	24.534.255,00	1 Laporan	25.760.967,75	1 Laporan	27.049.016,14	1 Laporan	28.401.466,94	1 Laporan	29.821.540,29	5 Laporan
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	Meningkatnya penerapan dan pengawasan persyaratan teknis	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan	50%	52%	87.678.500,00	54%	92.062.425,00	0,56	96.665.546,25	58%	101.498.823,56	0,60	106.573.764,74	60%

Masyarakat Veteriner	kesehatan masyarakat veteriner	masyarakat veteriner pada unit usahanya												
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	1 Laporan	61.714.700,00	1 Laporan	64.800.435,00	1 Laporan	68.040.456,75		71.442.479,59		75.014.603,57	103 Laporan
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan pada unit usaha produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap usaha produk hewan	25 Unit Usaha	10 Unit Usaha	25.963.800,00	10 Unit Usaha	27.261.990,00	10 Unit Usaha	28.625.089,50	10 Unit Usaha	30.056.343,98	10 Unit Usaha	31.559.161,17	50 Unit Usaha
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya pelayanan teknis perizinan pertanian	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	100%	100%	43.530.000,00	100%	45.706.500,00	1,00	47.991.825,00	100%	50.391.416,25	1,00	52.910.987,06	100%
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya fasilitasi teknis dan penerapan izin usaha sektor pertanian	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20 Dokumen	20 Dokumen	43.530.000,00	20 Dokumen	45.706.500,00	20 Dokumen	47.991.825,00	20 Dokumen	50.391.416,25	20 Dokumen	52.910.987,06	100 Dokumen
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20 Dokumen	20 Dokumen	43.530.000,00	20 Dokumen	45.706.500,00	20 Dokumen	47.991.825,00	20 Dokumen	50.391.416,25	20 Dokumen	52.910.987,06	100 Dokumen
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100%	100%		100%		1,00		100%		1,00		100%
		2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100%	100%		100%		1,00		100%		1,00		100%

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya upaya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di Kota Bima	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	233 Ha	68 Ha		68 Ha		68 Ha		68 Ha		68 Ha		68 Ha
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	66 Ha	19.960.000,00	66 Ha	20.958.000,00	66 Ha	22.005.900,00	66 Ha	23.106.195,00	66 Ha	24.261.504,75	66 Ha
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	33 Ha	2 Ha	14.086.000,00	2 Ha	14.790.300,00	2 Ha	15.529.815,00	2 Ha	16.306.305,75	2 Ha	17.121.621,04	2 Ha
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya SDM pelaku utama pembangunan pertanian sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming) dan berusaha tani lebih menguntungkan (better bussines)	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	5%	10%	517.127.820,00	15%	542.984.211,00	0,20	570.133.421,55	25%	598.640.092,63	0,30	628.572.097,26	30%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan penyuluhan pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	1 Laporan	1 Laporan	517.127.820,00	1 Laporan	542.984.211,00	1 Laporan	570.133.421,55	1 Laporan	598.640.092,63	1 Laporan	628.572.097,26	5 Laporan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 unit	47 unit	84.479.700,00	47 unit	88.703.685,00	47 unit	93.138.869,25	47 unit	97.795.812,71	47 unit	102.685.603,35	47 Unit

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksanya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 unit	16 unit	337.217.120,00	16 unit	354.077.976,00	16 unit	371.781.874,80	16 unit	390.370.968,54	16 unit	409.889.516,97	16 Unit
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 unit	3 unit	95.431.000,00	3 unit	100.202.550,00	3 unit	105.212.677,50	3 unit	110.473.311,38	3 unit	115.996.976,94	3 Unit

2. Kinerja Bidang Penyelenggaraan Urusan

Program pembangunan Kota Bima yang termuat dalam RPJMD Kota Bima 2025 – 2029 di implementasikan dalam kegiatan - kegiatan pembangunan pertanian yang diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap tiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Tabel 10. Indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Bima yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bima Tahun 2025 – 2029.

No.	Indikator		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2024)	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)	FORMULA
				2025	2026	2027	2028	2029		
1.	<i>Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian</i>		9,46	9,50	9,54	9,58	9,62	9,66	9,66	
	Padi (GKP)	Ton	20.718,24	20.732,24	20.740,53	20.748,83	20.757,13	20.765,43	20.765,43	
	Jagung (PK)	Ton	53.553,06	59.658,11	59.681,97	59.705,84	59.729,73	59.753,62	59.753,62	
	Kedelai (BK)	Ton	109,14	110,00	110,04	110,09	110,13	110,18	110,18	
	Kacang Tanah (BK)	Ton	121,38	121,50	121,55	121,60	121,65	121,69	121,69	
	Kacang Hijau (BK)	Ton	10,20	11,17	11,17	11,18	11,18	11,19	11,19	
	Tomat	Ton	5,90	5,90	5,90	5,90	5,91	5,91	5,91	
	Cabai	Ton	58,94	58,94	58,96	58,99	59,01	59,03	59,03	
	Tembakau	Ton	70,00	124,60	124,65	124,70	124,75	124,80	124,80	
	Mete	Ton	152,68	167,18	167,25	167,32	167,39	167,45	167,45	
	Kelapa	Ton	17,59	19,26	19,27	19,28	19,28	19,29	19,29	
	Daging	Ton	1.114,73	1.922,50	1.923,27	1.924,04	1.924,81	1.925,58	1.925,58	
	Telur	Ton	908,56	1.207,48	1.207,96	1.208,44	1.208,93	1.209,41	1.209,41	

BAB 5

Penutup

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 – 2029 ini akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pada lima tahun kedepan. Renstra ini akan dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif semua pihak, kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan disemua tingkatan serta terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kota Bima, Juni 2025
Plt. Kepala Dinas Pertanian



Drs. Alwi, M.AP.
(Pembina Utama Muda/IV c)
NIP. 196512311992021015